

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening
(Study kasus Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)

Oleh:

MEILYA EVITA SYARI
NIM. 52153024

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening
(Study kasus Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Pada Jurusan Akuntansi Syariah

Oleh:

MEILYA EVITA SYARI
NIM. 52153024

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019

ABSTRAK

Meilya Evita Syari (2019), Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang). Dengan Pembimbing Skripsi I Zuhrinal M. Nawawi, M.A dan Pembimbing II Rahmat Daim. M.AK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara simultan dan parsial pada pemerintah kabupaten Deli Serdang dan peran Belanja Daerah sebagai variabel intervening. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 22 kecamatan Di Kabupaten Deli Serdang. Sampel terpilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* berjumlah 20 Kecamatan dengan periode amatan dari tahun 2015-2018 sehingga diperoleh 80 unit analisis. Data diolah dengan menggunakan uji regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Daerah sebagai variabel intervening mampu memediasi hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Diketahui dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 40,68% terhadap pertumbuhan ekonomi. Diketahui pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 40,12% terhadap pertumbuhan ekonomi. Diketahui dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 19,99% terhadap Belanja Daerah. Diketahui pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 98,84% terhadap Belanja Daerah. Belanja Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Diketahui Belanja Daerah memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 58,74% terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Diketahui dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 72,98% terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening. Diketahui dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 76,4% terhadap pertumbuhan ekonomi dengan Belanja Daerah mampu memediasi anatara variabel independen dan dependen.

Kata Kunci : Pemerintah daerah , Dana Alokasi Umum, Pendapatan asli Daerah, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)”** diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Ahmad Saparudin dan Ibunda tercinta Irawati Br. Damanik, Penulis mengucapkan terima kasih atas pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan, memberikan doa, cinta, kasih sayang, nasihat dan semangat serta dukungan yang tak ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam berbagai hal terkhusus untuk penyelesaian skripsi ini. Dan tak lupa pula kepada Adik- adik yang selalu membantu dan mensupport penulis.
2. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, M.A selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Rahmat Daim, M.AK selaku Pembimbing Skripsi II ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,

arahan dan selalu mampu memberikan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Bapak rahmadi, selaku dosen Metodologi Penelitian yang membantu membimbing dan mengarahkan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Hendra Harmain, M.Pd, selaku ketua jurusan akuntansi syariah dan sebagai penasehat akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat.
7. Kepada Ibu Kusmilawaty, SE,M.AK selaku Sekretaris Jurusan yang banyak memberikan pelayanan dan membantu penulis selama penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta seluruh civitas akademik atas bimbingan, bantuan, dan layanan yang diberikan.
9. Bapak Sari Gultom, SH dan Ibu Arrohimah, SE selaku Penasehat selama penelitian di BAPENDA Lubuk Pakam, yang membantu penulis dan memberikan masukan terkait penulisan skripsi ini.
10. Hakim fachrizal chair zalukhu, teman yg selalu menemani, mendampingi, membantu hingga skripsi selesai, serta mensupport dalam suka dan duka, serta selalu berpositif thingking dalam segala hal.
11. Febrina Saraswati, Sri Aulia Miftah, sahabat sampai surga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Agustia Permata Sari S.AK, sahabat sampai surga yang selalu membantu dan memotivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
13. Rika amelia s. Dan Anggra Henni, sahabat sampai surga sekaligus adik yang tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Akhmad Noer Syahreza, Alfi yurian, Zainul arifin, M. Elwahby zuhri, khairul amri nst, Feki tamaria, arifandi rambe da yang lainnya, tim support yg selalu bersama, mmberikan semangat, tenaga, pikiran, alat bantu untuk menyelesaikan ini.
15. Teman-teman seperjuangan jurusan akuntansi syariah B angkatan 2015.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu-persatu yang telah berkenan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya dengan sebaik mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga isi Skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Medan, Juli 2019

Peneliti

Meilya Evita Syari

NIM . 52153024

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Batasan Masalah	14
D. Perumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat penelitian	16

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori	17
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	21
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23
4. Belanja Daerah	26
B. Landasan Syariah dalam hal laporan Anggaran Dana	32
C. Review Penelitian Terdahulu	32
D. Kerangka Konseptual	33
E. Hipotesis Penelitian	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Penelitian	37
B. Waktu Penelitian	37
C. Populasi	38
D. Sampel Penelitian	39
E. Jenis data	39
F. Sumber Data	40
G. Teknik Pengumpulan Data	41
H. Definisi Operasional	41
I. Teknik Analisa Data	42

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Instansi	57
B. Hasil penelitian	57
1. Analisis statistik descriptive	58
2. Uji asumsi klasik	58
a. Uji Normalitas	58
b. Uji multikolinieritaas	59
c. Uji autokorelasi	59
d. Uji heteroskedastisitas	60
3. Model Regresi	61
a. Model regresi linier berganda	61
4. Variabel Intervening	61
5. Pengujian model koefision determinasi	62
a. Uji koefision determinasi	62
b. Uji F	63
c. Uji T	64
C. Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung	66
D. Pembahasan	67
1. Pengaruh DAU terhadap PE	67
2. Pengaruh PAD terhadap PE	68
3. Pengaruh DAU terhadap BD	73
4. Pengaruh PAD terhadap BD	74
5. Pengaruh BD terhadap PE	75
6. Pengaruh DAU, PAD terhadap PE	76
7. Pengaruh DAU, PAD dengan BD sebagai mediasi terhadap PE	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasan penelitian	78
C. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan realisasi anggaran DAU	9
Tabel 1.2 Laporan realisasi anggaran PAD	10
Tabel 1.3 Laporan realisasi anggaran BD	11
Tabel 1.4 Laporan realisasi anggaran PE	12
Tabel 2.1 Review penelitian terdahulu	29
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	35
Tabel 3.2 Populasi penelitian	36
Tabel 3.3 Sampel penelitian	37
Tabel 4.1 Descriptive statistics	52
Tabel 4.2 Uji Normalitas	54
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi	56
Tabel 4.5 Uji regresi linier berganda	57
Tabel 4.6 Uji mediasi Z	58
Tabel 4.7 Uji mediasi X_2	59
Tabel 4.8 Uji koefisien determinasi	60
Tabel 4.9 Uji koefisien determinasi	61
Tabel 4.10 Uji Pengaruh Simultan dengan Uji F	62

Tabel 4.11 Uji Pengaruh Simultan dengan Uji F	62
Tabel 4.12 Uji Pengaruh Simultan dengan Uji T	64
Tabel 4.12 Uji Pengaruh Simultan dengan Uji T	65
Tabel 4.13 pengaruh langsung dan tidak langsung	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka Konseptual	31
Gambar Scaterrplot	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan lahirnya undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” maka setiap daerah terutama daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

“Dengan terjadinya perubahan pola pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi menyebabkan pemerintah daerah berubah menjadi daerah otonom”. Penyelenggaraan otonomi daerah pada masa sekarang dipahami sebagai hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan agar dapat mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan otonomi daerah pada saat ini dilaksanakan dengan memberi kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Desentralisasi memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan, keadilan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah. Pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang mulai

dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001. Kebijakan ini dipandang sangat demokratis karena sistem Pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama.

Pembangunan ekonomi merupakan proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah. “Pembangunan ekonomi meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan”. “Pertumbuhan ekonomi banyak terbantu oleh pembangunan manusia dan tidak mungkin berkelanjutan tanpanya”.

Di Indonesia pemerintah memiliki peranan yang cukup besar dalam sejarah perekonomian yaitu dalam pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Dalam hal ini pendapatan dan belanja dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan daerah tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan belanja mencakup Belanja Daerah.

Menurut Erlina mengenai Pendapatan Asli Daerah yaitu :

Kelompok Pendapatan Asli Daerah menurut Permendagri No.21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain lain Pendapatan Asli daerah yang sah. Untuk mengimbangi kemajuan sektor swasta dan masyarakat dalam konsep *Good Governance* (pemerintahan yang baik) dan meningkatkan daya saing maka dibutuhkan sumber daya manusia yang professional

terutama bagi yang mempunyai jabatan, hal ini terdapat dalam pasal 17 ayat (2) UU No. 43/1999 yaitu “pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut”.¹

Demikian juga halnya dalam keuangan daerah yang dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor essensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonominya.

Hal ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana yang berasal dari pendapatan asli daerah. Tanpa sumber-sumber keuangan yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas, kewajiban dan kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonomi menjadi hilang. Sumber keuangan daerah selalu terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal daerah harus mampu menyelenggarakan kewenangannya yang dimiliki maka harus ada perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pusat dan daerah.

¹ Erlina, *Metodologi Penelitian*, (USU Press:2011), h.25

“Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi”. Angka pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun ke tahun. Dalam sistem perekonomian, memiliki stabilisasi makroekonomi baik secara agregat maupun secara regional. “Menurut Michael P Todaro dan Stephen C Smith. Stabilisasi Makroekonomi memiliki 3 tujuan pokok yaitu”:

1. Mengendalikan tingkat inflasi yang terlampaui tinggi dan cenderung tidak terkendali.
2. Memperbaiki keseimbangan fiskal melalui pengurangan anggaran belanja pemerintah, peningkatan pendapatan pemerintah melalui kenaikan pajak-pajak kekayaan dan penghasilan, baik untuk badan usaha atau perorangan dan mereformasi sistem moneter nasional secara keseluruhan.
3. Menghapus defisit neraca transaksi berjalan melalui pengendalian nilai tukar mata uang domestik (devaluasi) dan penggalakan ekspor.

Dalam konsep perencanaan pembangunan, tersedianya dana untuk pembangunan, alokasi dana yang merata dan tepat sasaran, pengelolaan sumber- sumber pendapatan secara optimal, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja merupakan beberapa hal pokok yang harus selalu diprioritaskan. Dalam konsep perencanaan pembangunan, tersedianya dana untuk pembangunan, alokasi dana yang merata dan tepat sasaran, pengelolaan sumber- sumber pendapatan secara optimal, serta efisiensi dan efektivitas pengguna. Prinsip pemerataan alokasi dana dalam sistem pemerintahan otonomi di Indonesia.²

²Michael P.Todaro and Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Erlangga, 2004), h. 291

Dewasa ini telah dilaksanakan dengan adanya sistem transfer pendapatan antar pemerintah. Secara substansial terdapat 3 (tiga) lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan kepada pemerintahan yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar. Mengakibatkan diselenggarakannya system bagi hasil, alokasi dana umum, hibah atau subsidi antar entitas pemerintah.

Amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah adalah terciptanya kemandirian daerah dalam pengurusan daerahnya sendiri sebagai daerah otonom dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mewujudkan kemandirian daerah, maka setiap tahunnya Pemerintah Pusat mengalokasikan transfer dana ke daerah-daerah di seluruh Indonesia dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Transfer dana dari Pemerintah Pusat tersebut diharapkan dapat memacu Pemerintah Daerah untuk mencapai kemandiriannya dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan BLUD.

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah diharapkan akselerasi pembangunan dapat tercapai, dimana skala prioritas pembangunan baik infrastruktur dapat direncanakan, diprogramkan dan

dilaksanakan sendiri oleh daerah yang bersangkutan. Dengan demikian penggalan potensi daerah dapat dioptimalkan yang pada gilirannya roda perekonomian suatu daerah dapat berputar dan berkembang dengan baik.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah dimana pemerintah daerah otonomi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat. Kemandirian suatu daerah ditandai dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasinya pendapatan tersebut kedalam realisasi belanja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu ada beberapa indikator untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi meliputi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah.

Alokasi Belanja Daerah diperuntukkan bagi pembangunan sarana/prasarana dan infrastruktur. “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah” menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. PP Nomor 104 tahun 2000 menyatakan bahwa “pembagian dana alokasi khusus kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah”.

Pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan Pemerintah Pusat dan menganggarkan peningkatan Belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

“Belanja daerah adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja daerahnya didalam APBD untuk melaksanakan rencana pembangunan di daerah dalam bentuk proyek-proyek dan berbagai sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi dan diharapkan benar-benar langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah, APBD merupakan instrument kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian suatu daerah.³

³Michael P. Todaro and Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Erlangga, 2004), h. 291

Pengalokasian dana belanja daerah untuk kesejahteraan khususnya dibidang pendidikan, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴ Belanja daerah, dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang sudah dilakukan oleh Guntur Hendriwiyanto dengan judul Pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi, perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah penelitian terdahulu hanya menggunakan pendapatan daerah sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, dan menggunakan pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa Timur sebagai sampelnya, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sebagai indikator dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi dan sampel pada pemerintah kabupaten Deli serdang.

Berikut adalah gambaran data – data Laporan Keuangan yang terkait dengan permasalahan ini:

⁴Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 88.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Dana Lokasi Umum

No	Kecamatan	Laporan Realisasi Anggaran			
		Dana Alokasi Umum			
		2015	2016	2017	2018
1	Bangun Purba	1.001.542.000	1.080.215.507	1.086.282.210	1.203.323.247
2	Batang Kuis	827.153.453	855.787.030	871.927.247	972.025.825
3	Beringin	757.052.000	840.775.052	877.993.919	966.045.250
4	Biru- Biru	1.002.247.586	1.012.043.617	1.031.869.766	1.141.265.938
5	Deli TUA	789.565.000	801.713.443	921.384.109	881.979.959
6	Galang	857.303.370	858.175.531	867.400.725	953.515.826
7	Gunug Meriah	586.883.970	664.974.237	660.391.147	722.473.887
8	Hamparan Perak	793.934.226	856.714.078	867.300.289	930.584.969
9	Kutalim Baru	600.795.440	642.722.208	717.458.879	782.567.369
10	Labuhan Deli	608.993.530	629.006.913	634.169.767	731.141.647
11	Tanjung Morawa	682.130.000	706.774.342	782.462.654	862.083.501
12	Lubuk Pakam	618.600.000	666.926.184	712.690.907	746.157.310
13	Namo Rambe	388.026.360	454.475.242	489.097.673	517.617.234
14	Pagar Merbau	689.521.000	722.098.972	714.360.098	814.982.255
15	Pancur Batu	525.365.000	618.237.958	536.786.256	680.732.734
16	Pantai Labu	959.016.430	989.233.620	912.571.834	1.005.982.541
17	Patumbak	278.944.000	287.525.695	314.420.152	330.918.367
18	Percut Sei Tuan	397.367.000	439.246.348	426.093.607	473.156.910
19	Sibolangit	340.669.127	365.486.549	392.912.086	412.007.037
20	Sinembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir)	590.144.000	630.392.977	647.082.121	737.162.222
Total		13.295.253.49 2	14.122.525.50 3	14.464.655.44 6	15.865.724.02 8

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2019

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah

No	Kecamatan	Laporan Realisasi Anggaran			
		Pendapatan Asli Daerah			
		2015	2016	2017	2018
1	Bangun Purba	132.310.000	152.549.656	198.650.518	183.948.347
2	Batang Kuis	73.960.603	80.616.079	98.439.617	115.879.976
3	Beringin	66.675.209	93.628.876	114.305.536	119.626.935
4	Biru- Biru	84.068.694	102.702.673	108.914.764	117.966.483
5	Deli TUA	32.035.000	49.657.867	48.321.760	45.547.535
6	Galang	46.416.963	51.276.556	50.512.876	55.080.000
7	Gunug Meriah	45.679.466	63.573.539	68.158.690	79.210.273
8	Hamparan Perak	121.757.691	116.095.438	139.426.725	169.840.874
9	Kutalim Baru	44.613.447	68.121.599	76.398.018	81.148.306
10	Labuhan Deli	80.193.408	90.819.326	108.646.804	138.150.848
11	Tanjung Morawa	61.336.000	86.408.587	99.439.223	102.997.759
12	Lubuk Pakam	56.156.000	67.665.305	130.968.161	83.264.827
13	Namo Rambe	59.386.627	64.044.768	76.489.287	87.697.946
14	Pagar Merbau	98.488.451	130.020.658	186.949.235	177.432.356
15	Pancur Batu	186.182.167	287.299.507	258.671.098	260.761.858
16	Pantai Labu	327.508.555	360.152.627	441.871.142	433.229.474
17	Patumbak	47.373.000	66.190.681	91.472.357	85.455.323
18	Percut Sei Tuan	75.792.000	125.313.316	134.739.596	125.453.035
19	Sibolangit	66.221.948	77.318.390	90.795.675	101.194.687
20	Sinembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir)	185.000.000	231.694.925	296.046.879	336.600.000
Total		1.891.155.229	2.365.150.373	2.819.217.961	2.900.486.842

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2019

Tabel 1.3
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah

No	Kecamatan	Laporan Realisasi Anggaran			
		Belanja Daerah			
		2015	2016	2017	2018
1	Bangun Purba	198.387.000	148.925.370	198.090.778	277.432.358
2	Batang Kuis	160.345.464	148.648.941	258.510.712	165.359.431
3	Beringin	211.806.743	162.007.786	224.832.749	230.328.795
4	Biru- Biru	256.264.913	75.464.674	155.205.401	273.496.338
5	Deli Tua	165.334.000	165.098.145	346.469.211	151.976.198
6	Galang	293.282.221	81.881.618	120.103.190	198.585.642
7	Gunug Meriah	67.906.568	46.070.279	127.190.564	104.683.638
8	Hamparan Perak	126.796.185	141.989.093	140.387.573	238.620.625
9	Kotalim Baru	150.483.530	120.561.898	171.765.221	167.972.222
10	Labuhan Deli	86.369.359	96.777.124	102.602.892	117.935.152
11	Tanjung Morawa	193.365.000	174.769.060	123.497.618	290.730.646
12	Lubuk Pakam	200.693.000	168.592.433	148.249.419	212.222.839
13	Namo Rambe	72.184.790	103.648.704	126.161.699	209.795.165
14	Pagar Merbau	185.419.563	198.265.162	215.659.022	380.266.597
15	Pancur Batu	445.193.633	664.800.165	391.290.243	529.345.147
16	Pantai Labu	452.355.129	390.988.308	405.699.484	743.233.471
17	Patumbak	108.924.000	120.425.783	40.400.090	75.048.398
18	Percut Sei Tuan	118.662.000	108.449.609	165.939.884	144.145.482
19	Sibolangit	99.626.459	92.022.318	140.365.711	132.136.682
20	Sinembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir)	309.715.000	342.503.050	274.296.336	347.269.662
Total		3.903.114.557	3.551.889.520	3.876.717.797	4.990.584.488

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2019

Tabel 1.4
Laporan Realisasi Anggaran Pertumbuhan Ekonomi

No	Kecamatan	Laporan Realisasi Anggaran			
		Pertumbuhan Ekonomi			
		2015	2016	2017	2018
1	Bangun Purba	38.282.169	41.262.099	46.092.239	51.291.763
2	Batang Kuis	16.133.203	17.264.686	18.595.077	20.160.894
3	Beringin	15.496.974	16.737.740	18.435.750	20.573.047
4	Biru- Biru	20.360.837	22.271.424	24.844.613	27.491.630
5	Deli TUA	10.474.020	11.914.003	12.771.907	13.931.810
6	Galang	14.501.906	15.841.183	17.572.448	19.344.956
7	Gunug Meriah	7.047.927	8.179.328	9.131.570	10.018.855
8	Hamparan Perak	15.564.718	17.118.740	19.170.306	20.982.832
9	Kotalim Baru	8.297.703	8.994.427	10.157.419	10.994.066
10	Labuhan Deli	10.300.942	11.188.168	12.265.684	13.531.778
11	Tanjung Morawa	41.528.321	41.956.488	46.409.619	53.044.751
12	Lubuk Pakam	13.541.816	14.767.393	15.894.711	17.120.524
13	Namo Rambe	13.215.853	14.156.385	15.957.021	17.495.516
14	Pagar Merbau	42.445.653	48.283.356	57.260.099	63.617.115
15	Pancur Batu	82.977.554	89.735.793	97.526.722	106.773.286
16	Pantai Labu	60.444.487	70.281.163	82.002.176	95.612863
17	Patumbak	3.697.957	4.394.807	5.175.324	5.921.024
18	Percut Sei Tuan	10.089.944	11.904.600	13.908.900	15.487.434
19	Sibolangit	8.933.934	9.877.195	10.931.430	12.117.055
20	Sinembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir)	29.525.360	31.475.388	35.679.065	40.528.808
Total		462.861.278	507.604.366	569.782.080	636.040.007

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2019

Dari tabel diatas mengenai Laporan Realisasi Anggaran pada masing-masing variabel dapat disimpulkan ialah, pada Pendapatan Asli daerah yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya, begitu pula dengan Dana Alokasi Umum (DAU) pada kabupaten Deli Serdang terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan pula.

Begitu juga dengan Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami peningkatan yang baik apabila keduanya mengalami kenaikan, Apabila terjadinya hal diatas, maka pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Seharusnya begitu pula pada Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) sangat berpengaruh pada belanja daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia pada suatu daerah, serta belanja daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun pada tabel diatas menunjukkan pada tahun 2016 mengalami penurunan, padahal pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kemandirian daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan sendiri tanpa perlu terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian diatas di lakukan untuk penelitian dengan judul :

“Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka dapat di identifikasikan permasalahan Penelitian Sebagai Berikut:

1. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum yang belum maksimal oleh pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Daerah.
2. Pendapatan asli daerah masih belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota.
3. Belanja Daerah Mengalami Penurunan dikarenakan Pemerintah daerah belum maksimal mengelola Belanja Daerah.
4. Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya, dikarenakan kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia di suatu kabupaten/kota.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian lebih terfokus, penulis membatasi masalah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), berupa pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Anggaran Belanja Daerah pada Kabupaten Deli Serdang tahun 2015-2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang ?

3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Deli Serdang?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Deli Serdang?
5. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang?
6. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang ?
7. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel Intervening di Kabupaten Deli Serdang ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Deli Serdang.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Deli Serdang.
5. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
6. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.

7. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variable Intervening di Kabupaten Deli Serdang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi :

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara yang menjadi lokasi penelitian, untuk dapat menganalisis Pertumbuhan Ekonominya dalam hal ini pengaruhnya dengan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.
3. Bagi akademis diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama pada bidang penelitian sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

“Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”. “Jika pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi, kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan” (Todaro dan Smith, Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. “Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya”).

“Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai peningkatan output agregat atau pendapatan riil, kedua peningkatan tersebut biasanya di hitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input”. Menurut Hendriwiyanto harga yang digunakan dalam perhitungan belanja daerah yaitu: Terdapat dua macam harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan cara membandingkan PDRB tahun tertentu dengan tahun sebelumnya berdasarkan ADHK.⁵

⁵V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 28.

a. Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi

Berikut ini adalah ciri-cirinya:

1. Terjadi laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang cepat
2. Adanya peningkatan produktivitas masyarakat
3. Terjadi perubahan struktural yang tinggi
4. Adanya urbanisasi dalam suatu negara
5. Melakukan ekspansi ke negara maju
6. Terjadinya arus barang, modal, dan manusia antar bangsa-bangsa di dunia

b. Faktor- Faktor Yang mempengaruhi pertumbuhan Eonomi

Setelah memahami pengertian pertumbuhan ekonomi dan ciri-cirinya, maka kita juga harus tahu faktor apa yang mempengaruhinya. Berikut ini adalah faktor-faktor perumbuhan ekonomi yang mempengaruhi bisnis.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor SDM dapat mempercepat atau justru memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, ketika suatu negara memiliki peningkatan jumlah pengangguran terhadap penduduknya maka negara tersebut dapat dikatakan sedang mengalami kemunduran.

Penurunan kualitas sumber daya manusia menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran yang diperparah dengan semakin sedikitnya lapangan pekerjaan. Meningkatnya pengangguran bisa memicu semakin tingginya kemiskinan masyarakat. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa dari suatu bisnis atau perusahaan.

Masyarakat akan cenderung menghemat pendapatannya dan hanya membelanjakannya untuk hal-hal yang primer saja.

2) Sumber Daya Alam

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun, kekayaan SDA tersebut tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang baik untuk mengelolanya. Akibatnya, Indonesia seringkali melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali saat barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal.

Dengan keterbatasan pengelolaan sumber daya alam ini mengharuskan suatu bisnis atau perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan bahan mentah seringkali harus mengimpor bahan dasar dari luar negeri sehingga mengakibatkan produk perusahaan jauh lebih mahal daripada ketika harus mendapatkannya dari dalam negeri. Inilah yang seringkali menjadi dilema di masyarakat kita. Karena masih banyak produk-produk dalam negeri yang dinilai mahal yang membuat permintaannya menurun.

3) Kemajuan IPTEK

Suatu negara dikatakan maju dalam ekonomi ketika mengalami peningkatan dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Tak terkecuali pada suatu perusahaan yang mengedepankan teknologi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang lebih efisien.

Penggunaan teknologi yang sudah maju mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan produk lebih cepat dan efisien. Teknologi dalam hal peralatan produksi yang digunakan dapat membantu meminimalisir serapan tenaga kerja sehingga

anggaran untuk pegawai dapat dipangkas dan digunakan untuk keperluan lain.⁶

Namun, untuk bisnis yang sedang berkembang umumnya masih sulit untuk menerapkan teknologi dalam usahanya. Karena pembelian peralatan modern dinilai masih mahal dan harus mengimpor dari luar negeri.

4) Tingkat Inflasi

Inflasi juga merupakan salah satu gejala yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Inflasi adalah kejadian dimana laju peredaran rupiah tak terkendali. Meningkatnya harga-harga berpengaruh terhadap produktifitas bahan baku karena menyebabkan peningkatan biaya operasi perusahaan untuk pemasokan bahan baku. Tidak hanya itu, adanya inflasi akan mempengaruhi gaji pegawai suatu perusahaan.

Terdapat dua tipe inflasi yang dapat berpengaruh langsung terhadap bisnis perusahaan yaitu cos-push inflation dan deman-pull inflation. Cos-push inflation adalah harga produk naik karena permintaan masyarakat naik dan deman-pull inflation adalah kenaikan permintaan masyarakat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa.

5) Tingkat Suku Bunga

Perkembangan ekonomi mempengaruhi tingkat suku bunga suatu negara. Pertumbuhan ini cenderung membuat tingkat suku bunga mengalami kenaikan karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Suku bunga yang tinggi berpengaruh buruk terhadap bisnis atau perusahaan yang umumnya menggunakan modal pinjaman untuk meningkatkan kualitas perusahaan.

⁶ Boediono, *Ekonomi Moneter*, (Medan, salemba:2015) h. 20

Selain itu, adanya suku bunga yang tinggi mempengaruhi permintaan investasi yang rendah tentu ini berdampak buruk terhadap saham perusahaan. Alasannya karena investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Perkembangan suatu bisnis sangat dipengaruhi secara langsung dari hasil pertumbuhan ekonomi di negara. Kesimpulan yang bisa didapatkan adalah ketika pertumbuhan kearah yang lebih baik maka permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa juga akan naik begitu juga sebaliknya.⁷

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004 yaitu “pengalokasian dana alokasi umum ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity)”. Apabila suatu daerah memiliki potensi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang besar tetapi kebutuhan fiskal kecil maka akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relative kecil. Sebaliknya untuk daerah yang potensi fiskalnya kecil dan pertumbuhan ekonomi yang kecil sedangkan kebutuhan fiskalnya

⁷ Raharjdo, Asisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011) h. 30-32

besar maka akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relative besar.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima dana alokasi umum sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima dana alokasi umum sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatife dan nilai negatife tersebut lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima dana alokasi umum. Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Pemerintah merumuskan formula dan perhitungan dana alokasi umum dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Hasil perhitungan dana alokasi umum per provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Rincian dana alokasi umum untuk masing-masing daerah disampaikan oleh dewan pertimbangan otonomi daerah. Penyaluran dana alokasi umum pada masing-masing kas daerah dilaksanakan oleh menteri keuangan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari dana alokasi umum daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

Pedoman penyusunan APBD bahwa penggunaan Dana Perimbangan DAU agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji & tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi & pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar & pelayanan umum yang

dibutuhkan masyarakat. Dana alokasi umum merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di Indonesia yang tujuannya untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.⁸

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah” (Halim, 2007:96), Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta, karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut maka daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diatur dalam undang-undang.

“Otonomi telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya”, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, yakni dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang “Pajak Daerah” dan “Retribusi Daerah”.

⁸Michael P. Todaro and Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Erlangga, 2004), h. 298

Perubahan berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan dari daerah tersebut merupakan hal yang wajar, karena diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi dengan muatan kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggung jawabannya. Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana yang diperoleh atau berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah. Dalam otonomi daerah pembangunan ekonomi suatu daerah dilakukan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah, karena hak atas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah telah diserahkan secara otonom kepada Pemerintah Daerah yaitu pemerintah Kabupaten dan Kota.⁹

a. **Klasifikasi Pendapatan Daerah**

1. **Pajak Daerah**

Menurut UU No 11/1957, pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada setiap objek pajak seperti orang/badan maupun benda bergerak/tidak bergerak. Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Rochmad, 1980 (dalam Josef 2005) adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Propinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya. Sedangkan menurut Siagian, (dalam Josef, 2005) pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-Undang”. Menurut Ahmad (2008) pajak daerah adalah : “Pajak daerah adalah iuran wajib

⁹ Halim, Abdul (et.al). *Perpajakan*. (Medan: Salemba 4. 2015) h. 19

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Ciri-ciri pajak daerah menurut Josef (2005) adalah :

- a) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan undang-undang dan/peraturan hukum lainnya.
- d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang no 24 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Ahmad (2008) , kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:

- a) Bersifat pajak bukan retribusi
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum

- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat
- e) Potensinya memadai
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h) Menjaga kelestarian lingkungan Sesuai dengan undang-undang No. 34 tahun 2000, tentang perubahan atas undang-undang no. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak provinsi terdiri dari :
 - a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak kendaraan di atas air
 - e) Pajak air di bawah tanah
 - f) Pajak air permukaan

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

a) Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah yang bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b) Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga/catering.

c) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan ketangkasan, dan/ keramaian dengan nama atau bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

d) Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya oleh pemerintah daerah.

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Pajak pengambilan galian golongan C adalah pajak atas kejadian pengambilan bahan galian golongan C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang merupakan objek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi abses, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, salomit, feldspar, garam batu (*halite*), garafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerekil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit.

g) Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2. Retribusi Daerah

Menurut UU no. 34 tahun 2000 pasal 1 dinyatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan :

Ciri-ciri retribusi daerah menurut Josef (1998) adalah :

- a. Retribusi daerah dipungut oleh daerah
- b. Dalam pemungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan oleh daerah langsung dapat ditunjuk
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau merasakan jasa yang disediakan daerah.

Adapun yang termasuk retribusi daerah menurut UU no. 34 tahun 2000 adalah:

1) Retribusi jasa umum

- a) Pelayanan kesehatan
- b) Pelayanan kebersihan
- c) Penggantian biaya cetak KTP dan akte kelahiran
- d) Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
- e) Pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f) Pelayanan pasar
- g) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- h) Penggantian biaya cetak peta
- i) Pengujian kapal perikanan

2) Retribusi jasa usaha

- a) Pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir/pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan
- g) Retribusi penyedotan kakus
- h) Retribusi rumah potong hewan
- i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- k) Retribusi tempat penyeberangan di atas air
- l) Retribusi pengolahan limbah cair

m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3) Retribusi perizinan tertentu

- a) Izin mendirikan bangunan
- b) Izin penggunaan tanah
- c) Izin gangguan
- d) Izin trayek

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari (Abdul,2007)

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Di banding UU No. 25 tahun 1999, UU No. 34 tahun 2004 menyebutkan secara jelas tentang komponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak

- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

4. Belanja Daerah

Istilah belanja dalam akuntansi sektor publik hampir serupa dengan istilah beban dalam akuntansi sektor komersial. Menurut Abdul Halim menyatakan bahwa :

Menurut IASC Framework Biaya/Belanja Daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau deplesi aset atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana. Dari defenisi tersebut, terlihat bahwa belanja terjadi dikarenakan penggunaan aset (dalam segala bentuk) untuk kegiatan operasional entitas; sehingga belanja dapat diakui walaupun tidak terjadi arus keluar kas. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa “Belanja Daerah merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.

Belanja daerah dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses

pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit. “PSAP No.2 Paragraf 34 menyatakan bahwa belanja di klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi Ekonomi merupakan pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas”.

Menurut Erlina menyatakan bahwa :

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain sedangkan Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Belanja Daerah Sangat Berkaitan dengan anggaran daerah karena Belanja daerah merupakan bagian dari anggaran daerah, hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya yang ada, maka diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan penentuan kurun waktu atas alokasi tersebut. Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang “ pengelolaan keuangan daerah diklarifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah”.¹⁰

B. Landasan Syariah dalam hal Laporan Anggaran dana

Terdapat ayat Alquran yang berkaitan dengan anggaran belanja yaitu dalam surah an-Nahl (16) : 90:

¹⁰ Erlina. *Metodologi Penelitian*. (Medan : USU Press. 2011) h. 23

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Kaitannya dengan Laporan anggaran dana yaitu, dalam menyusun anggaran hendaklah dilakukan secara adil, tidak memihak kepada siapapun. Serta bertujuan untuk kepentingan bersama. Bukan menciptakan maupun menganiaya orang lain. Al Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebajikan dan menjauhi keburukan didalam Alquran.¹¹

Q.S Al-Furqaan (25) : 67

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

¹¹ <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90#tafsir-jalalayn> diakses pada 18 Februari 2018 Pukul20.00 WIB.

Q.S Al- Hasyr (59) : 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang di berikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Dari ayat diatas (Q.S Al-Hasyr : 7) Allah SWT jelas-jelas memerintahkan supaya kekayaan dan sumber daya didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung maupun melalui regulasi. Bentuk intervensi langsung antara lain menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya dengan cara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.

Secara syariat, anggaran belanja negara harus digunakan untuk kepentingan yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar minimal pertahanan, penegakan hukum, kegiatan dakwah islam, amar makruf nahi munkar, penegakan keadilan, administrasi publik, serta untuk melayani kepentingan sosial lainnya. Yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat dan pasar. Dengan demikian, ketika negara dijalankan dengan prinsip-prinsip islam, maka seluruh kegiatan negara ini harus patuh dan taat terhadap ketentuan yang dikehendaki oleh syariat.¹²

B. Review Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu telah banyak melakukan penelitian ini, diantaranya: Penelitian berikutnya juga dilakukan oleh Rori (2016) dengan judul analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi(studi pada pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara), hasil penalitan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulaweai Utara.

Penelitian juga dilakukan oleh Hendriwiyanto (2015) dengan judul pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi pada tahun 2010-2012 di Jawa Timur, hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil dengan arah positif selain itu pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh dana alokasi khusus tetapi dengan arah berlawanan atau negatif. Penelitian berikutnya juga dilakukan oleh Amalia (2014) dengan judul analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah 2010/2012).¹³

¹²Nurul Huda, *et.al.*, *Publik Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 65

¹³ Hendriwiyanto, pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi pada tahun 2010-2012 di Jawa Timur, (jawa: 2015)

Hasil penelitian hasil penalitan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dilakukan oleh Frelistiyani (2010) dengan judul pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah dengan belanja modal sebagai variable intervening (studi pada pemerintahan kabupaten/kota Sejava pada tahun 2006-2008), hasil penelitian bahwa dana alokasi umum berpengaruh scara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Topik	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian
Rori (2016)	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dependen Pertumbuhan Ekonomi.	hasil penelitian bahwa pendapatanaslidaerahberpengaruhpositifdansignifikan terhadap pertumbuhanekonomi di sulawesi utara	hasil penelitian peneliti bahwa pendapatan asli daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Deli Serdang
Hendriwiyanto (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi dgn belanja modal sebagai variabel mediasi (studi pada pemerintahan kabupaten kota di jawa timur tahun 2010-2012)	Independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Intervening Belanja modal Dependen Pertumbuhan Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia.	Hasil Penelitian bahwa PAD, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhanekonomi. Selain itu dana alokasi khusus berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Hasil Penelitian bahwa PAD, dana alokasi umum, berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Serta belanja daerah mampu memediasi antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Amalia (2014)	Analisis pengaruh PAD dan belanja modal Terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi pada pemerintahan Kabupaten /Kota di jawa tengah 2010-2012).	Independen Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Dependen Pertumbuhan Ekonomi.	hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara signifikan Terhadap pertumbuhan ekonomi	hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah berpengaruhsecarasignifikan Terhadap pertumbuhan ekonomi
Fatma (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap PAD dengan belanja modal sebagai intervening (studi pada pemerintahan kab	Independen Dana Alokasi Umum Intervening Belanja Modal	Hasil pengujian secara langsung bahwa Dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap	Hasil pengujian secara langsung bahwa Dana alokasi umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara

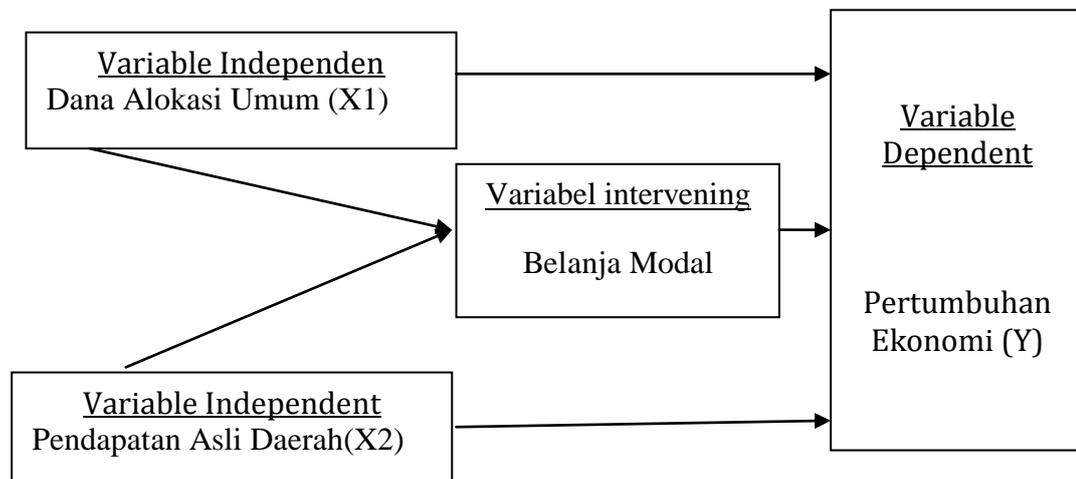
	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2006-2008.	Dependen Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli daerah dan Belanja modal Berpengaruh tidak signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.	signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Belanja daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap pertumbuhan ekonomi.
--	--	---	--	--

Perbedaan antara judul penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian Pertama hanya memakai satu Variabel dengan variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, sama halnya dengan penelitian kedua juga memakai satu variabel. Namun menggunakan variabel mediasi. penelitian ketiga menggunakan dua variabel dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.

Dari ketiga penelitian yang di atas, berbeda dengan penelitian yang diambil, yaitu menggunakan dua variabel dan menggunakan Belanja Daerah sebagai variabel intervening, namun judul yang diteliti hampir sama dengan judul penelitian terdahulu yang keempat, namun bedanya ialah, penelitian terdahulu memakai Belanja Modal sebagai Variabel interveningnya sedangkan peneliti mengambil belanja daerah sebagai variabel intervening.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu, maka dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut.



Gambar 2.1. Skema Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual diatas dimulai dengan bagan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah yang mana diartikan sebagai sumber pokok untuk menentukan peningkatan maupun penurunan pertumbuhan ekonomi. Laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Deli Serdang 2015-2018, selanjutnya adalah bagan Belanja Daerah sebagai Pemediasi antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah yang terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Daerah yang memiliki Alokasi Dasar yang positif atau tinggi maka daerah tersebut akan memacu pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selanjutnya Alokasi Belanja sebagai Pemediasi antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dana alokasi umum memiliki peran yang penting di dalam perekonomian suatu daerah. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat yang menginginkan peningkatan kualitas layanan publik, pemerintah berusaha untuk membangun infrastruktur yang dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Dengan meningkatnya alokasi Belanja Daerah Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Belanja Daerah pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu rumusan masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Sinkron dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual. Kerangka konseptual menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y) sedangkan variabel independen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), dan Belanja Daerah (Z) sebagai variabel intervening. Pada kerangka konsep ini akan dijelaskan mengenai hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen serta dengan variabel intervening dengan uraian berikut:

a) **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana alokasi umum yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dikarenakan dana alokasi umum yang diberikan pemerintah kepada setiap daerah tidak sama hal ini berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

H_1 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara Parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang

b) **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan lokal khususnya melalui pendapatan asli

daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah yang positif akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan daerah jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki juga akan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga turut meningkat.

H₂ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara Parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang

c) Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dana alokasi umum yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dikarenakan dana alokasi umum yang diberikan pemerintah kepada setiap daerah tidak sama hal ini berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah dan tergantung pada belanja daerah di suatu daerah.

H₃ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara Parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Deli Serdang

d) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan lokal khususnya melalui pendapatan asli daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah yang positif akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan daerah jika pendapatan asli daerah meningkat

maka dana yang dimiliki juga akan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga turut meningkat.

H₄ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara Parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Deli Serdang

e) Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada pada pemerintah daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Di negara-negara yang berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata, sistem pasar juga perlu diawasi dengan kebijakan pemerintah.

H₅ : Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.

f) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi

Infrastruktur sarana dan prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan belanja daerah agar infrastruktur terlaksana dibutuhkan pendapatan asli daerah yang tinggi. Dana alokasi umum sangat berpengaruh terhadap belanja daerah dikarenakan belanja daerah lebih didominasi oleh dana alokasi umum. Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sendiri sumber daya yang

dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan dana alokasi umum. “Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah, belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi”

H₆ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.

g) Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah sebagai variabel intervening di Kabupaten Deli Serdang

Pertumbuhan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada pada pemerintah daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Di negara-negara yang berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata, sistem pasar juga perlu diawasi dengan kebijakan pemerintah.

H₅ : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening di Kabupaten Deli Serdang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data dan dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain seperti buku-buku dan sebagainya.¹⁴

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan pada Kabupaten Deli Serdang. Data penelitian diperoleh dari bagian Keuangan BAPENDA Dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari menentukan judul penelitian pada bulan November 2018 hingga selesai dilakukan.

Tabel 3.1
Waktu penelitian

No	Kegiatan	N o v	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan judul skripsi									
2	Bimbingan proposal skripsi									
3	Seminar proposal skripsi									
4	Bimbingan skripsi									
5	Sidang munaqasah									

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G*. (Bandung: Alfabeta, 2013).h. 18

C. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari 22 Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dengan data pengamatan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 (4 tahun). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015-2018 dengan data penelitian sebanyak 88 data, dimana jumlah tersebut diperoleh dengan rumus yaitu :

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

No	Nama Kecamatan		
1	Bangun Purba	12	Tanjung Morawa
2	Batang Kuis	13	Lubuk Pakam
3	Beringin	14	Namo Rambe
4	Biru-Biru	15	Pagar Merbau
5	Deli Tua	16	Pancur Batu
6	Galang	17	Pantai Labu
7	Gunung Meriah	18	Patumbak
8	Hampan Perak	19	Percut Sei Tuan
9	Kotalim Bru	20	Sibolangit
10	Labuhan Deli	21	STM Hilir (sinembah tanjung muda)
11	Sunggal	22	STM Hulu

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipergunakan sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian menggunakan metode Pemilihan

purposive sampling. Metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria pemilihan sampel berikut:

1. Laporan keuangan yang telah selesai di rekap keseluruhan.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2015-2018 yang sudah di Audit BPK atau Laporan Realisasi APBD.
3. Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2015-2018 yang telah diunggah di website Badan Pusat Statistik.

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No	Nama kecamatan	Kriteria		
		1	2	3
1	Bangun Purba	✓	✓	✓
2	Batang Kuis	✓	✓	✓
3	Beringin	✓	✓	✓
4	Biru-Biru	✓	✓	✓
5	Deli Tua	✓	✓	✓
6	Galang	✓	✓	✓
7	Gunung Meriah	✓	✓	✓
8	Hampanan Perak	✓	✓	✓
9	Kutalim Baru	✓	✓	✓
10	Labuhan Deli	✓	✓	✓
11	Tanjung Morawa	✓	✓	✓
12	Lubuk Pakam	✓	✓	✓
13	Namo Rambe	✓	✓	✓
14	Pagar Merbau	✓	✓	✓
15	Pancur Batu	✓	✓	✓
16	Pantai Labu	✓	✓	✓
17	Patumbak	✓	✓	✓
18	Percut Sei Tuan	✓	✓	✓
19	Sibolangit	✓	✓	✓
20	STM Hilir	✓	✓	✓
21	STM Hulu	-	✓	✓
22	Sunggal	-	✓	✓

Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel, maka dapat ditetapkan yang menjadi sampel hanya beberapa data kecamatan. Sampel terdiri dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang dengan data pengamatan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 (4 tahun).

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari pihak lain. Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), sebagai Variabel Independen terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Dependen melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening.

2. Sumber Data

Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari pihak lain. Dalam penelitian ini, cara mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan didukung dari berbagai pihak lain. Data yang dimaksud adalah data yang ada kaitannya dengan variabel-variabel pada penelitian. Sumber data untuk variabel dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja daerah, laporan realisasi anggaran (LRA) didapatkan melalui dokumentasi dan pengumpulan data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan

menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil 20 data dari sebagian populasi yaitu sebanyak 20 kecamatan di Deli Serdang.

F. Defenisi Operasional

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran *constuct* yang lebih baik.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah “variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi yang berasal dari laporan realisasi anggaran dan *produk domestik bruto*.

Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa “Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu keadaan dimana terdapat peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari suatu daerah, pertumbuhan ekonomi daerah dikatakan meningkat jika ada kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun sebelumnya”. “Terdapat dua macam harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga Konstan (ADHK) , tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan cara membandingkan PDRB tahun tertentu dengan tahun sebelumnya berdasarkan ADHK.”

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif maupun yang negatif bagi variabel dependen nantinya. Variasi dalam variabel dependen merupakan hasil dari variabel independen. “Variabel independen sering juga disebut dengan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel dana alokasi umum diukur berdasarkan angka dari jumlah penerimaan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam Realisasi APBD Pemerintahan Sumatera Utara tahun 2015-2018.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah jumlah keseluruhan penerimaan pemerintah kabupaten Deli Serdang yang dijadikan sampel dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau selama 4 tahun. Variabel pendapatan asli daerah ini diukur berdasarkan angka yang sebenarnya tercantum dalam total realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah.

3. Variabel Intervening

“Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen”. Variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan dapat diamati dan diukur. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah.

G. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera utara dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening dengan menggunakan regresi linier berganda (*multiple regression linear analysis*). Data tersebut di-run menggunakan software SPSS IBM Statistics 22.

1. Analisis Deskriptif

“Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness”. Analisis ini akan memberipenjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

a) Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal. Menurut mengenai uji normalitas Ghozali yaitu :

Screening terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi, jika terdapat normalitas maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Multivariate normality merupakan asumsi bahwa setiap variabel dan semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal, jika asumsi ini dipenuhi maka nilai residual dari analisis juga berdistribusi normal dan independen.

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

“Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal, jika variabel tidak berdistribusi normal maka hasil uji statistik akan terdegradasi”.

Menurut Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji Kolmogorov smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. “Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan uji ini uji Kolmogorov-Smirnov”.

a. Uji Multikolinearitas

“Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi Ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas”. Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya.

Peneliti akan melihat *Tolerance* dan *Variance Infaltion Factors* (VIF) dengan alat bantu program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Ghozali menyatakan bahwa :

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10.

b. Uji Autokorelasi

Dalam pembahasan uji autokorelasi Ghazali menerangkan bahwa :

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya), Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi, Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtun waktu (*timeseries*) karena “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *cross section* (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi. karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. “Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi”. Pengujian ada tidaknya masalah autokorelasi, peneliti akan menggunakan uji *Run test* dengan alat bantu SPSS.

“Run Test digunakan hanya untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)”. jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif. “Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW), Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen”.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji heteroskedastisitas Ghozali memberikan penjelasan yaitu :

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam model, peneliti akan menggunakan uji glejser dengan bantuan program SPSS. Apabila koefisien parameter beta > 0.05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.

b) Pengujian Regresi

“Analisis Regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel, variabel dependen diasumsikan random yang berartimempunyai distribusi probabilistik, variabel independen bebas di asumsikan memiliki nilai tetap”. Pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak (*fit*) untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan alat bantu program SPSS versi 23.0. Kriteria pengujiannya adalah seperti berikut ini:

1. H_0 diterima dan H_a ditolak yaitu apabila $\rho \text{ value} > 0.05$ atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai *alpha* 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian.
2. H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu apabila $\rho \text{ value} > 0.05$ atau bila nilai signifikansi kurang dari nilai *alpha* 0,05 berarti

model regresi dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.

1) Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta Z + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

Z = Belanja Daerah

e = Error

c) Variabel Intervening

“Variabel Intervening merupakan variabel antara atau variabel mediasi , variabel ini memiliki fungsi untuk memediasi hubungan antara variabel Independen dengan variabel dependen”. Dalam pengujian variabel intervening, Imam Ghozali menjelaskan bahwa :

Untuk menuji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (path analysis), analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kuualitas antar variabel (model casual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

d) Pengujian Hipotesis Penelitian

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. “Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik, apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak), Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima”.

1) Uji Koefisien Determinasi

“Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen”. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Menurut Imam Ghozali. Menjelaskan tentang nilai koefisien determinasi sebagai berikut : Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

“Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen”. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Apabila nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} , maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Menurut Imam Ghozali, untuk menuji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Quick look, bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5% , dengan kata lain dapat menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel independen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel, bila nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

“Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen”. Menurut Imam Ghozali, cara melakukan uji t adalah sebagai berikut : Quick look, bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2, dengan kata lain dapat menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu

variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

1. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel, apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t_{tabel} , kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwasuatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*significance*). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Sejarah Perusahaan

Mengacu kepada Peraturan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Pada tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pangkat Daerah yang penyusunan didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai tindak lanjut penyusunan Renstra harus dibuat Rencana Kinerja dan Capaian Akuntabilitas Instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan organisasi yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka satu instansi pemerintah seperti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan- perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam hubungan perencanaan Strategis sebagai proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif, harus mampu mengorganisasikan secara sistematis usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya dengan umpan baik yang terorganisasi dan sistematis pula.

Dan disisi lain perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia juga sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global serta tetap dalam tataan system manajemen Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Penyusunan dokumen ini selain memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga dimaksudkan untuk menghimpun dan mensinkronkan program dan kegiatan yang sesuai dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mencaoai Visi dan Misi Kepala Daerah. Sedangkan tujuannya adalah memberikan kerangka perencanaan selama periode 2014-2019 bagi seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Untuk itulah Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2014-2019 memuat tentang VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, Dan STRATEGIS pencapaian tujuan dan sasaran guna memberikan arah dan gambaran yang jelas terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan terlebih dahulu dalam menghadapi era globalisasi serta berbagai eksis lingkungan yang berkala daerah.

2. Ruang Lingkup Perusahaan

Ruang lingkup perusahaan Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang. Hanya berada pada kawasan Kab. Deli Serdang Saja. Tidak berlaku untuk kawasan Kab. Serdang bedagai.

3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah

Adapun yang menjadi visi dan misi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Visi

Terwujudnya lembaga yang professional, akuntabel dan transparan dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan pajak daerah.
- b. Meningkatkan kinerja secara akuntabilitas dan transparan dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang berbasis teknologi

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Statitik Deskriptif

“Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standardeviasi, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sampel”. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut”. Analisis ini akan memberi penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	80	278944000,0	1203323247	721851980,9	218722299,6
X2	80	32035000,00	441871142,0	124700130,1	87927847,86
Y	80	3697957,00	106773286,0	27203596,64	24138330,40
Z	80	40400090,00	743233471,0	204028829,5	129564695,7
Valid N (listwise)	80				

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan Data Tabel 4.1 statistik deskriptif menunjukkan bahwa :

1. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum 278944000,0, nilai maksimum 32035000,00, nilai rata-rata 3697957,00 dan memiliki standar deviasi 218722299,6.

2. Variabel Tingkat Pendapatan Asli Daerah nilai minimum 32035000,00, nilai maksimum 441871142,0 nilai rata-rata 124700130,1 dan memiliki standar deviasi 87927847,86.
3. Variabel Tingkat Pertumbuhan Ekonomi nilai minimum 3697957,00, nilai maksimum 106773286,0, nilai rata-rata 27203596,64 dan nilai standar deviasi 24138330,40.
4. Variabel Tingkat Belanja Daerah nilai minimum 40400090,00, nilai maksimum 743233471,0, nilai rata-rata 204028829,5 dan nilai standar deviasi 129564695,7.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

“Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal, jika variabel tidak berdistribusi normal maka hasil uji statistic akan terdegradasi”.

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji kolmogorov-Sminov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Kelebihan dari uji Kolmogorov-Sminov ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi diantara satu pengamat dengan pengamat yang lain. Tingkat signifikansi yang digunakan . Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas . Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi sedangkan nilai signifikan $< 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Tabel 4.2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov – Smirnov – Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a-b}	Mean	,0000000
	Std.	14774066,80
Most Extreme Difference	Deviation	,208
	Absolute	,208
	Positive	-,121
Test Statistic	Negatif	,208
Asymp. Sig (2- tailed)		,100 ^c

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data primer diolah,2019

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa :

Nilai probabilitas atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,100. Maka nilai sig > 0.05 ($0,100 > 0.05$) dan asumsi normalitas ini terpenuhi.

a. Uji Multikolinieritas

Untuk memeriksa apakah terjadi multikolinieritas atau tidak terjadinya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai Cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan hanya dengan multikolinieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10. Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasikan ada kasus multikolinieritas, Nilai VIF yang tidak lebih besar dari 10 diindikasikan tidak ada kasus multikolinieritas.

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dana Alokasi Umum (X_1)	,938	1,066
Pendapatan Asli Daerah (X_2)	,938	1,066

a. Dependent Variable: Y (PE)

Sumber: *Data primer diolah, 2019*

Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui nilai VIF dari ;

1. Dana Alokasi Umum (X_1) adalah 1,066

2. Pendapatan Asli daerah (X_2) adalah 1,066.

Jika seluruh nilai VIF tidak lebih dari 10, maka diindikasikan tidak terjadi multikolinearitas. Karena nilai VIF dari masing-masing variabel, < 10, maka diindikasikan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dana Alokasi Umum (X_1)	,916	1,091
Pendapatan Asli Daerah (X_2)	,383	2,612
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	,375	2,669

a. Dependent Variable: Z (BD)

Sumber: *Data primer diolah, 2019*

Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui nilai VIF dari ;

1. Dana Alokasi Umum (X_1) adalah 1,091

2. Pendapatan Asli daerah (X_2) adalah 2,612

3. Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah 2,669

Jika seluruh nilai VIF tidak lebih dari 10, maka diindikasikan tidak terjadi multikolinearitas. Karena nilai VIF dari masing-masing variabel, < 10, maka diindikasikan tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Pengujian ada tidaknya masalah autokorelasi, peneliti akan menggunakan uji *Run test* dengan alat bantu SPSS. “Run Test digunakan hanya untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)”. jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif.

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-3025118,04846
Cases < Test Value	40
Cases >= Test Value	40
Total Cases	80
Number of Runs	38
Z	-,675
Asymp. Sig. (2-tailed)	,500

a. Median

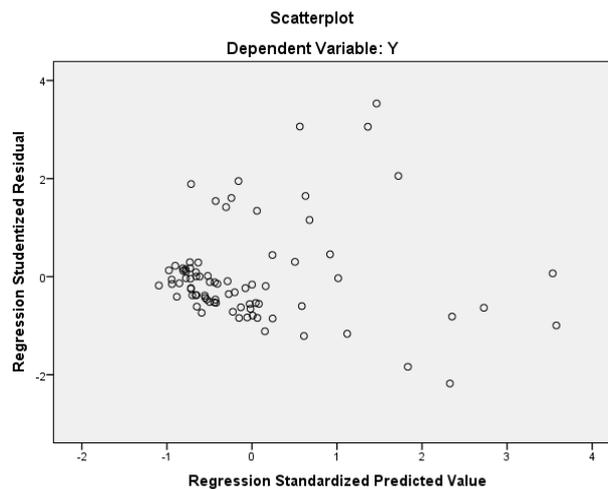
sumber: data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa :

Hasil Runs Test yaitu -3025118,04846 dengan probabilitas 0,500 signifikan pada 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Dari grafik *Scatterplot* dapat dilihat bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dengan alasan.

1. Titik-titik dapat menyebar diatas dan di bawah atau sekitar angka 0.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola tertentu

3. Model Regresi

a. Model Regesi Linier Berganda

Pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak (*fit*) untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan alat bantu program SPSS versi 22.0.

Tabel 4.5
Uji Regresi Linier Beranda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	76076,247	30341,053		2,507	,023
Dana Alokasi Umum(X_1)	,188	,054	,334	3,474	,003
Pendapatan Asli Daerah(X_2)	,745	,062	1,150	11,943	,000

a. Dependent Variable : Pertumbuhan Ekonomi (Y)

sumber: data diolah 2019

$$Y = 76076,247 + 0,188 X_1 + 0,745 X_2 + e$$

Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui nilai koefisien regresi dari ;

1. Variabel Dana Alokasi Umum (X_1) adalah 0,188
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) adalah 0,745

Diketahui nilai koefisien regresi bernilai positif. Hal ini berarti, Dana Alokasi Umum (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

4. Variabel Intervening

“Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating, Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen”. Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (Path Analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6
Uji Mediasi Z

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	69468728,853	47650523,710		1,458	,149
DAU	,190	,064	,319	2,970	,004

a. Dependent Variable: BD

Tabel 4.7
Uji Mediasi X₂

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14822256,451	22375204,761		,662	,510
DAU	,003	,031	,009	,112	,911
BD	,520	,052	,764	9,906	,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: data Diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.6 dan 4.7 dapat dinyatakan bahwa uji intervening :

Hasil Output SPSS memberikan nilai standardized Beta Dana Alokasi Umum pada persamaan regresi (1) sebesar 0,319 dan Signifikan pada 0,000 yang berarti dana alokasi umum mempengaruhi belanja daerah. Nilai Koefisien Standardized Beta 0,319 merupakan nilai Path atau jalur p2. Pada output SPSS persamaan Regresi (2) nilai Standardized Beta Belanja daerah 0.764 dan Dana Alokasi Umum 0,09. nilai Standardized Beta Dana Alokasi Umum 0.09 merupakan nilai jalur Path p1 dan nilai Standardized Beta Belanja Daerah 0,764 merupakan nilai jalur Path p3 besarnya nilai $e1 = (1-0,102)^2 = 0,806$ dan besarnya nilai $e2 = (1-0,588)^2 = 0,169$.

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dapat berpengaruh langsung ke Belanja daerah dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari Dana Alokasi Umum ke Belanja Daerah (sebagai Variable Intervening) lalu ke Pendapatan Asli Daerah. Besarnya berpengaruh langsung adalah 0,319 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus di hitung dengan mengalihkan koefisien tidak langsungnya $(0,319) \times (0,09) = 0,02871$ atau Total Pengaruh Dana Alokasi Umum ke Pendapatan Asli Daerah $0,764 + (0,319) \times (0,09) = 0,79271$

5. Pengujian Model Koefisien Determinasi

a. Uji Koefisien Determinasi

Nilai *Koefisien Determinasi* ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($Adjusted R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila *Koefisien Determinasi* = 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila *Koefisien Determinasi* = 1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

Tabel 4.8
Uji Koefisien Deteminasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,863 ^a	,745	,735	12416737,22884

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, BD

b. Dependent Variable: PE

sumber : data diolah, 2019

B

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa :

Hasil $Adjusted R^2$ yaitu 0,863^a, hal ini berarti 86,3%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah mampu menjelaskan variabilitas dependen Pertumbuhan Ekonomi daerah sebesar 86,3%. Sementara itu Sisanya sebesar 13,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti di penelitian ini.

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,791 ^a	,626	,616	14958148,0932 1

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: PE

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa :

Hasil Adjusted R^2 yaitu 0,791^a, hal ini berarti 79,1%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah mampu menjelaskan variabilitas dependent Pertumbuhan Ekonomi daerah sebesar 79,1%. Sementara itu Sisanya sebesar 20,9% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti di penelitian ini.

b. Uji F

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y). Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka ada pengaruh yang signifikan. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh yang signifikan.

Tabel 4.10
Uji Pengaruh Simultan dengan Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	3,417E + 16	3	1,139E + 16	72,988	,000 ^b
Residual	1,186E + 16	76	1,561E + 14		
Total	4,603E + 16	79			

a. Dependent Variable: Y(PE)

b. Predictors: (Constant), Z, X₁, X₂

Sumber: Data Diola, 2019

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui nilai F_{hitung} adalah 72,988. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($72,988 > 2,494$), maka disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (X₁) dan Pendapatan Asli Daerah (X₂) secara bersama-sama atau simultan, berpengaruh signifikan (secara statistika) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Tabel 4.11
Uji Pengaruh Simultan dengan Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	7,975E+ 17	2	3,988E + 17	58,078	,000 ^b
Residual	5,287E + 17	77	6,866E + 15		
Total	1,326E + 18	79			

a. Dependent Variable: Z

B. Predictors: (Constant) X₁, X₂

Sumber: Data Diola, 2019

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui nilai F_{hitung} adalah 58,078. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($58,0788 > 2,494$), maka disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) secara bersama-sama atau simultan, berpengaruh signifikan (secara statistika) terhadap Belanja Daerah (Z).

c. Uji T

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*significance*). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

Tabel 4.12

Uji Signifikansi Pengaruh Parsial Dengan Uji T

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-8103875,379	4927594,523		-1,645	,104
Dana Alokasi Umum (X_1)	,003	,007	,029	4,068	,041
Pendapatan Asli Daerah (X_2)	,100	,025	,363	4,012	,000
Belanja Daerah (Z)	,101	,017	,542	5,874	,000

a. Dependent Variable: Y (PE)

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan table 4.10 Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh yang signifikan. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan.

1. Hasil Uji Dana Alokasi Umum (X_1) terhadap pertumbuhan Ekonomi (Y).
Berdasarkan tabel 4.12, diketahui nilai probabilitas (*Sig.*) dari Dana Alokasi Umum (X_1), yakni $0,041 < 0,05$ dan nilai statistik t dari Dana Alokasi Umum (X_1) $t_{hitung} 4,068 > t_{tabel} 1,992$ maka variabel Dana Alokasi Umum (X_1) berpengaruh signifikan (secara statistika) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), pada tingkat Signifikansi 5%.
2. Hasil Uji Pendapatan Asli Daerah sebagai (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).
Berdasarkan tabel 4.12, diketahui nilai probabilitas (*Sig.*) dari Pendapatan Asli Daerah (X_2), yakni $0,00 < 0,05$ dan nilai statistik t dari Pendapatan Asli Daerah (X_2) $t_{hitung} 4,012 > t_{tabel} 1,992$ maka variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) berpengaruh signifikan (secara statistika) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), pada tingkat signifikansi 5%.
3. Hasil Uji Belanja Daerah sebagai (Z) terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan tabel 4.12, diketahui nilai probabilitas (*Sig.*) dari Belanja Daerah (Z), yakni $0,00 < 0,05$ dan nilai statistik t dari Belanja Daerah (Z) $t_{hitung} 5,874 > t_{tabel} 1,992$ maka variabel Belanja Daerah (Z) berpengaruh signifikan (secara statistika) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), pada tingkat signifikansi 5%.

Tabel 4.13
Uji Signifikansi Pengaruh Parsial Dengan Uji T
Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15124225,74	32639346,68		,463	,644
Dana Alokasi Umum (X ₁)	,075	,044	,126	1,999	,039
Pendapatan Asli Daerah (X ₂)	1,082	,109	,734	9,884	,000
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	2,897	,532	,533	5,441	,000

a. Dependent Variable: Z (BD)

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan table 4.13 Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh yang signifikan. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan.

1. Hasil Uji Dana Alokasi Umum (X₁) terhadap Belanja Daerah (Z).
Berdasarkan tabel 4.13, diketahui nilai probabilitas (*Sig.*) dari Dana Alokasi Umum (X₁), yakni $0,39 > 0,05$ dan nilai statistik t dari Dana Alokasi Umum (X₁) $t_{hitung} 1,999 > t_{tabel} 1,992$ maka variabel Dana Alokasi Umum (X₁) berpengaruh signifikan (secara statistika) terhadap Belanja Daerah (Z), pada tingkat Signifikansi 5%.
2. Hasil Uji Pendapatan Asli Daerah sebagai X₂ Terhadap Belanja Daerah (Z)
Berdasarkan tabel 4.13, diketahui nilai probabilitas (*Sig.*) dari Pendapatan Asli Daerah (X₂), yakni $0,00 < 0,05$ dan nilai statistik t dari Pendapatan Asli Daerah (X₂) $t_{hitung} 9,884 > t_{tabel} 1,992$ maka variabel Pendapatan Asli Daerah (X₂) berpengaruh signifikan (secara statistika) terhadap Belanja Daerah (Z), pada tingkat signifikansi 5%.

C. Pengaruh langsung dan tidak langsung

Berikut tabel yang menggambarkan pengaruh langsung dan tidak langsung pada penelitian ini:

Tabel 4.14
Pengaruh langsung dan tidak langsung

Pengaruh	Nilai Pengaruh	kesimpulan
$X_1 - Z$	0,039	Berpengaruh langsung
$X_2 - Z$	0,000	Berpengaruh langsung
$Z - Y$	0,611	Berpengaruh tidak langsung
$X_1 - Y$	0,041	Berpengaruh langsung
$X_2 - Y$	0,000	Berpengaruh langsung
$X_1 - Z - Y$	0,117	Berpengaruh tidak langsung
$X_2 - Z - Y$	0,448	Berpengaruh tidak langsung

Dari tabel 4.14 diatas, dapat disimpulkan diperoleh nilai signifikan X_1 sebesar $0,039 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_1 terhadap Z . Diperoleh nilai signifikan X_2 sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_2 terhadap Z . diperoleh nilai Z terhadap Y $0,611 > 0,005$, sehingga secara tidak langsung terdapat pengaruh signifikan Z terhadap Y . Diperoleh nilai signifikan X_1 sebesar $0,041 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_1 terhadap Y . Diperoleh nilai signifikan X_2 sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_2 terhadap Y .

Analisis pengaruh X_1 melalui Z terhadap Y , diketahui pengaruh langsung X_1 terhadap Y sebesar 0,126. Sedangkan pengaruh tidak langsung X_1 melalui Z terhadap Y adalah perkalian antara nilai X_1 terhadap Y dengan nilai beta Z terhadap Y yaitu: $0,126 \times 0,611 = 0,076$. Maka pengaruh total yang di berikan X_1 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu $0,041 + 0,076 = 0,117$. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dilihat nilai pengaruh langsung 0,041 dan pengaruh tidak langsung 0,076 yang berarti

nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan nilai pengaruh langsung ($0,076 > 0,041$), hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X_1 melalui Z mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y.

Analisis pengaruh X_2 melalui Z terhadap Y, diketahui pengaruh langsung X_2 terhadap Y sebesar 0,734. Sedangkan pengaruh tidak langsung X_2 melalui Z terhadap Y adalah perkalian antara nilai X_1 terhadap Y dengan nilai beta Z terhadap Y yaitu: $0,000 \times 0,611 = 0,448$. Maka pengaruh total yang di berikan X_2 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu $0,000 + 0,448 = 0,448$. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dilihat nilai pengaruh langsung 0,000 dan pengaruh tidak langsung 0,448 yang berarti nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan nilai pengaruh langsung ($0,448 > 0,000$), hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X_2 melalui Z mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa t hitung dari Dana Alokasi Umum adalah 4,068. Karena $4,068 > t_{tabel} 1,992$, maka Dana Alokasi Umum (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil uji ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hendriwiyanto (2015) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah yang positif.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa t hitung dari

Pendapatan Asli Daerah (X_2) adalah 4,012 jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($4,012 > t_{tabel}$ 1,992) maka Pendapatan Asli Daerah (X_2) berpengaruh positif Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil uji ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hendriwiyanto (2015) dan Rori (2016) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada Pertumbuhan Ekonomi.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_1) berpengaruh terhadap belanja daerah

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa t hitung dari Dana Alokasi Umum adalah 1,999. Karena $1,999 > t_{tabel}$ 1,992, maka Dana Alokasi Umum (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Belanja Daerah(Z)

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa t hitung dari Pendapatan Asli Daerah (X_2) adalah 9,884 jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($9,884 > t_{tabel}$ 1,992) maka Pendapatan Asli Daerah (X_2) berpengaruh positif Pertumbuhan Ekonomi (Y).

5. Pengaruh Belanja Daerah (Z) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa Belanja Daerah (Z) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa t hitung dari Belanja Daerah (Z) adalah 5,874 jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($5,874 > t_{tabel}$ 1,992) maka Pendapatan Asli Daerah (X_2) berpengaruh positif Pertumbuhan Ekonomi (Y).

6. Pengaruh Dana Alokasi Umum(X_1) dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa F_{hitung} adalah 72,988, Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($72,988 > 2,494$), maka disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) secara bersama-sama atau simultan, berpengaruh signifikan (secara statistika) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil uji ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hendriwiyanto (2015) dan Rori (2016) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

7. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) dengan Belanja Daerah (Z) sebagai pemediasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Berdasarkan uji Intervening diperoleh hasil bahwa Belanja Daerah (Z) berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), pada tingkat signifikansi 0,764. Hasil uji ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hendriwiyanto (2015), Belanja Modal tidak menjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa informasi sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi..
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi..
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.
5. Belanja Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi..
6. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
7. Dan secara keseluruhan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening. Diketahui dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 76,4% terhadap pertumbuhan ekonomi dengan Belanja Daerah mampu memediasi anatara variabel independen dan dependen.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas untuk mencari kejelasan pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah, terhadap pertumbuhan ekonomi serta menggunakan belanja daerah sebagai variabel intervening. Sehingga

hasil penelitian yang dihasilkan belum mampu menggeneralisir teori yang ada, terlebih masih banyak variabel lain yang juga mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

C. Saran

Berdasarkan analisa dari hasil serta pembahasan penelitian ini telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka peneliti memberikan informasi sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel lain yang berkaitan erat secara teori terhadap variabel Pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi mahasiswa disarankan dapat meningkatkan pengetahuan terhadap perkembangan ekonomi agar mahasiswa lebih berperilaku etis, sehingga dalam pengembangan kurikulum, muatan etika sebaiknya diberikan dalam setiap mata kuliah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (et.al). *Perpajakan*. Medan: Salemba 4. 2015.
- Adisasmita Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Amalia, Analisis pengaruh PAD dan belanja modal Terhadap pertumbuhan ekonomi Studi pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2010-2012. Skripsi Diakses 2014
- Abdul Halim, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ainur Rofiq, 2007. *Klasifikasi Belanja Daerah*. <http://www.Rofiq.web.id> tanggal 5 Januari 2009
- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE-Yogyakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady, Dadang Solihin. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Duwi Priyatno. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Jakarta: MediaKom.
- Boediono. *Ekonomi Moneter*. Medan: Salemba. 2015
- Erlina. *Metodologi Penelitian*. Medan : USU Press. 2011
- Fatma, Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap PAD dengan belanja modal sebagai intervening studi pada pemerintahan kab Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2006-2008, Skripsi diakses 2014
- Hendriwiyanto, *pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi pada tahun 2010-2012 di Jawa Timur*, Jawa: 2015

Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Josef Riwu Kaho. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.

Rori , *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara*, Sulawesi: Skripsi Diakses 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G* . Bandung: Alfabeta, 2013.

Todaro, Michael P and Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Medan: Erlangga. 2004.

Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015

Lampiran

Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum

No	Kecamatan	Laporan Realisasi Anggaran			
		Dana Alokasi Umum			
		2015	2016	2017	2018
1	Bangun Purba	1.001.542.000	1.080.215.507	1.086.282.210	1.203.323.247
2	Batang Kuis	827.153.453	855.787.030	871.927.247	972.025.825
3	Beringin	757.052.000	840.775.052	877.993.919	966.045.250
4	Biru- Biru	1.002.247.586	1.012.043.617	1.031.869.766	1.141.265.938
5	Deli TUA	789.565.000	801.713.443	921.384.109	881.979.959
6	Galang	857.303.370	858.175.531	867.400.725	953.515.826
7	Gunug Meriah	586.883.970	664.974.237	660.391.147	722.473.887
8	Hamparan Perak	793.934.226	856.714.078	867.300.289	930.584.969
9	Kutalim Baru	600.795.440	642.722.208	717.458.879	782.567.369
10	Labuhan Deli	608.993.530	629.006.913	634.169.767	731.141.647
11	Tanjung Morawa	682.130.000	706.774.342	782.462.654	862.083.501
12	Lubuk Pakam	618.600.000	666.926.184	712.690.907	746.157.310
13	Namo Rambe	388.026.360	454.475.242	489.097.673	517.617.234
14	Pagar Merbau	689.521.000	722.098.972	714.360.098	814.982.255
15	Pancur Batu	525.365.000	618.237.958	536.786.256	680.732.734
16	Pantai Labu	959.016.430	989.233.620	912.571.834	1.005.982.541
17	Patumbak	278.944.000	287.525.695	314.420.152	330.918.367
18	Percut Sei Tuan	397.367.000	439.246.348	426.093.607	473.156.910
19	Sibolangit	340.669.127	365.486.549	392.912.086	412.007.037
20	Sinembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir)	590.144.000	630.392.977	647.082.121	737.162.222

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah

No	Kecamatan	Laporan Realisasi Anggaran			
		Pendapatan Asli Daerah			
		2015	2016	2017	2018
1	Bangun Purba	132.310.000	152.549.656	198.650.518	183.948.347
2	Batang Kuis	73.960.603	80.616.079	98.439.617	115.879.976
3	Beringin	66.675.209	93.628.876	114.305.536	119.626.935
4	Biru- Biru	84.068.694	102.702.673	108.914.764	117.966.483
5	Deli TUA	32.035.000	49.657.867	48.321.760	45.547.535
6	Galang	46.416.963	51.276.556	50.512.876	55.080.000

7	Gunug Meriah	45.679.466	63.573.539	68.158.690	79.210.273
8	Hampan Perak	121.757.691	116.095.438	139.426.725	169.840.874
9	Kutalim Baru	44.613.447	68.121.599	76.398.018	81.148.306
10	Labuhan Deli	80.193.408	90.819.326	108.646.804	138.150.848
11	Tanjung Morawa	61.336.000	86.408.587	99.439.223	102.997.759
12	Lubuk Pakam	56.156.000	67.665.305	130.968.161	83.264.827
13	Namo Rambe	59.386.627	64.044.768	76.489.287	87.697.946
14	Pagar Merbau	98.488.451	130.020.658	186.949.235	177.432.356
15	Pancur Batu	186.182.167	287.299.507	258.671.098	260.761.858
16	Pantai Labu	327.508.555	360.152.627	441.871.142	433.229.474
17	Patumbak	47.373.000	66.190.681	91.472.357	85.455.323
18	Percut Sei Tuan	75.792.000	125.313.316	134.739.596	125.453.035
19	Sibolangit	66.221.948	77.318.390	90.795.675	101.194.687
20	Sinembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir)	185.000.000	231.694.925	296.046.879	336.600.000

Laporan Realisasi Anggaran Pertumbuhan Ekonomi

No	Kecamatan	Laporan Realisasi Anggaran			
		Pertumbuhan Ekonomi			
		2015	2016	2017	2018
1	Bangun Purba	38.282.169	41.262.099	46.092.239	51.291.763
2	Batang Kuis	16.133.203	17.264.686	18.595.077	20.160.894
3	Beringin	15.496.974	16.737.740	18.435.750	20.573.047
4	Biru- Biru	20.360.837	22.271.424	24.844.613	27.491.630
5	Deli TUA	10.474.020	11.914.003	12.771.907	13.931.810
6	Galang	14.501.906	15.841.183	17.572.448	19.344.956
7	Gunug Meriah	7.047.927	8.179.328	9.131.570	10.018.855
8	Hampan Perak	15.564.718	17.118.740	19.170.306	20.982.832
9	Kutalim Baru	8.297.703	8.994.427	10.157.419	10.994.066
10	Labuhan Deli	10.300.942	11.188.168	12.265.684	13.531.778
11	Tanjung Morawa	41.528.321	41.956.488	46.409.619	53.044.751
12	Lubuk Pakam	13.541.816	14.767.393	15.894.711	17.120.524
13	Namo Rambe	13.215.853	14.156.385	15.957.021	17.495.516
14	Pagar Merbau	42.445.653	48.283.356	57.260.099	63.617.115
15	Pancur Batu	82.977.554	89.735.793	97.526.722	106.773.286
16	Pantai Labu	60.444.487	70.281.163	82.002.176	95.612863
17	Patumbak	3.697.957	4.394.807	5.175.324	5.921.024
18	Percut Sei Tuan	10.089.944	11.904.600	13.908.900	15.487.434

19	Sibolangit	8.933.934	9.877.195	10.931.430	12.117.055
20	Sinembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir)	29.525.360	31.475.388	35.679.065	40.528.808

Laporan Realisasi APBD Belanja Daerah

No	Kecamatan	Laporan Realisasi Anggaran			
		Pertumbuhan Ekonomi			
		2015	2016	2017	2018
1	Bangun Purba	198.387.000	148.925.370	198.090.778	277.432.358
2	Batang Kuis	160.345.464	148.648.941	258.510.712	165.359.431
3	Beringin	211.806.743	162.007.786	224.832.749	230.328.795
4	Biru- Biru	256.264.913	75.464.674	155.205.401	273.496.338
5	Deli TUA	165.334.000	165.098.145	346.469.211	151.976.198
6	Galang	293.282.221	81.881.618	120.103.190	198.585.642
7	Gunug Meriah	67.906.568	46.070.279	127.190.564	104.683.638
8	Hampanan Perak	126.796.185	141.989.093	140.387.573	238.620.625
9	Kotalim Baru	150.483.530	120.561.898	171.765.221	167.972.222
10	Labuhan Deli	86.369.359	96.777.124	102.602.892	117.935.152
11	Tanjung Morawa	193.365.000	174.769.060	123.497.618	290.730.646
12	Lubuk Pakam	200.693.000	168.592.433	148.249.419	212.222.839
13	Namo Rambe	72.184.790	103.648.704	126.161.699	209.795.165
14	Pagar Merbau	185.419.563	198.265.162	215.659.022	380.266.597
15	Pancur Batu	445.193.633	664.800.165	391.290.243	529.345.147
16	Pantai Labu	452.355.129	390.988.308	405.699.484	743.233.471
17	Patumbak	108.924.000	120.425.783	40.400.090	75.048.398
18	Percut Sei Tuan	118.662.000	108.449.609	165.939.884	144.145.482
19	Sibolangit	99.626.459	92.022.318	140.365.711	132.136.682
20	Sinembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir)	309.715.000	342.503.050	274.296.336	347.269.662

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	80	278944000,0	1203323247	721851980,9	218722299,6
X2	80	32035000,00	441871142,0	124700130,1	87927847,86
Y	80	3697957,00	106773286,0	27203596,64	24138330,40
Z	80	40400090,00	743233471,0	204028829,5	129564695,7
Valid N (listwise)	80				

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov – Smirnov – Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a-b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	14774066,80
Most Extreme Difference	Absolute	,208
	Positive	,208
	Negatif	-,121
Test Statistic		,208
Asymp. Sig (2- tailed)		,100 ^c

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dana Alokasi Umum (X ₁)	,938	1,066
Pendapatan Asli Daerah (X ₂)	,938	1,066

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dana Alokasi Umum (X ₁)	,916	1,091
Pendapatan Asli Daerah (X ₂)	,383	2,612
Pertumbuhan Ekonomi(Y)	,375	2,669

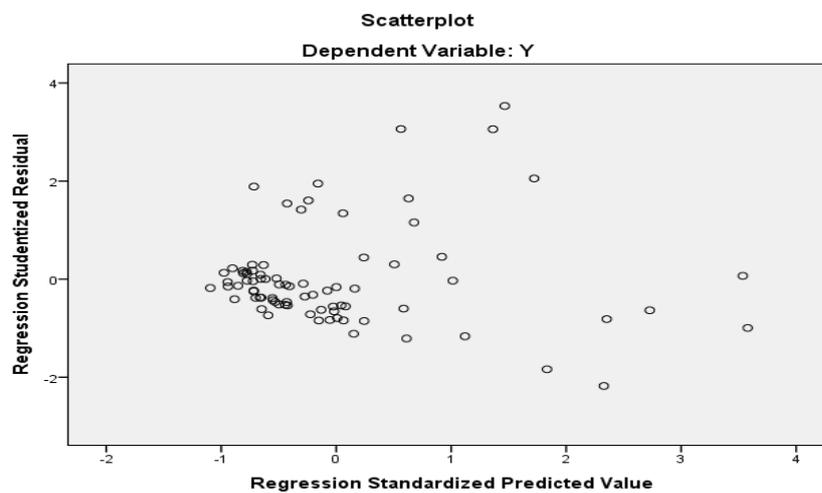
Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-3025118,04846
Cases < Test Value	40
Cases >= Test Value	40
Total Cases	80
Number of Runs	38
Z	-,675
Asymp. Sig. (2-tailed)	,500

a. Median

sumber: data diolah 2019



Uji Regresi Linier Beranda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	76076,247	30341,053		2,507	,023
Dana Alokasi Umum(X ₁)	,188	,054	,334	3,474	,003
Pendapatan Asli Daerah(X ₂)	,745	,062	1,150	11,943	,000

a. Dependent Variable : Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Uji Mediasi Z

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	69468728,853	47650523,710		1,458	,149
DAU	,190	,064	,319	2,970	,004

a. Dependent Variable: BD

Uji Mediasi X₂

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14822256,451	22375204,761		,662	,510
DAU	,003	,031	,009	,112	,911
BD	,520	,052	,764	9,906	,000

a. Dependent Variable: PAD

Uji Koefisien Deteminasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,863 ^a	,745	,735	12416737,22884

Uji Koefisien Deteminasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,791 ^a	,626	,616	14958148,09321

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: PE

Uji Pengaruh Simultan dengan Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	3,417E + 16	3	1,139E + 16	72,988	,000 ^b
Residual	1,186E + 16	76	1,561E + 14		
Total	4,603E + 16	79			

a. Dependent Variable: Y(PE)

b. Predictors: (Constant),Z, X₁, X₂

Uji Pengaruh Simultan dengan Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	7,975E+ 17	2	3,988E + 17	58,078	,000 ^b
Residual	5,287E + 17	77	6,866E + 15		
Total	1,326E + 18	79			

a. Dependent Variable: Z

Uji Signifikansi Pengaruh Parsial Dengan Uji T

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-8103875,379	4927594,523		-1,645	,104
Dana Alokasi Umum (X ₁)	,003	,007	,029	4,068	,041
Pendapatan Asli Daerah (X ₂)	,100	,025	,363	4,012	,000
Belanja Daerah (z)	,101	,017	,542	5,874	,000

a. Dependent Variable: Y (PE)

Uji Signifikansi Pengaruh Parsial Dengan Uji T

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15124225,74	32639346,68		,463	,644
Dana Alokasi Umum (X ₁)	,075	,044	,126	1,999	,039
Pendapatan Asli Daerah (X ₂)	1,082	,109	,734	9,884	,000

a. Dependent Variable: Z (BD)